



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Mukim dalam Kabupaten Aceh Barat telah ada sejak dahulu, namun dimungkinkan pula untuk dilakukan pembentukan Mukim yang baru guna terwujudnya sistem pemerintahan Mukim yang mencakup dalam semua kecamatan;
 - b. bahwa pembentukan Mukim dalam Kabupaten Aceh Barat menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat;
 - c. bahwa pembentukan Mukim dalam Kabupaten Aceh Barat harus berlandaskan hukum sesuai dengan tata jenis dan hierarki pembentukan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Mukim Dalam Kabupaten Aceh Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1002);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 19);
10. Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kecamatan adalah Suatu Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gubungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Gampong adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak terdidional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pusat Pemerintahan Mukim adalah Ibu Kota Mukim.

BAB II
MUKIM DI KECAMATAN KAWAY XVI

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Kaway XVI.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Peureumeu;
 - b. Mukim Pasi Jeumpa; dan
 - c. Mukim Tanjong Meulaboh.

Pasal 3

- (1) Wilayah Mukim Peureumeu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Keude Aron;
 - b. Gampong Kampong Mesjid;
 - c. Gampong Padang Mancang;
 - d. Gampong Meunasah Buloh;
 - e. Gampong Alue Tampak;
 - f. Gampong Beureugang;
 - g. Gampong Marek;
 - h. Gampong Pasi Jambu;
 - i. Gampong Meunasah Ara;
 - j. Gampong Meunasah Rayeuk;
 - k. Gampong Simpang;
 - l. Gampong Peunia;
 - m. Gampong Tumpok Ladang; dan
 - n. Gampong Pasi Teungoh.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Peureumeu mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Peureumeu berada pada Gampong Keude Aron.

Pasal 4

- (1) Wilayah Mukim Pasi Jeumpa sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Pasi jeumpa;
 - b. Gampong Putim;
 - c. Gampong Meunasah Rambot;
 - d. Gampong Palimbungan;
 - e. Gampong Muko;
 - f. Gampong Meunasah Gantung;
 - g. Gampong Blang Geunang;
 - h. Gampong Puuk;
 - i. Gampong Tanjong Meulaboh;
 - j. Gampong Alue On; dan
 - k. Gampong Batu Jaya.

(2) Luas...

- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Pasi Jumpa mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Pasi Jumpa berada pada Gampong Pasi Jeumpa.

Pasal 5

- (1) Wilayah Mukim Tanjong Meulaboh sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Keude Tanjong;
 - b. Gampong Tanjong Meulaboh;
 - c. Gampong Pungkie;
 - d. Gampong Pucok Pungkie;
 - e. Gampong Teuladan;
 - f. Gampong Pasi Ara;
 - g. Gampong Meunuang Tanjong;
 - h. Gampong Alue Lhee;
 - i. Gampong Blang Dalam;
 - j. Gampong Teupin Panah;
 - k. Gampong Drien Caleu;
 - l. Gampong Alue Peudeung;
 - m. Gampong Pasi Meugat;
 - n. Gampong Babah Meulaboh;
 - o. Gampong Pasi Kumbang;
 - p. Gampong Padang Sikabu;
 - q. Gampong Sawang Teubei;
 - r. Gampong Alue Lhok; dan
 - s. Gampong Keuramat.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Tanjong Meulaboh mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Tanjong Meulaboh berada pada Gampong Keude Tanjong.

BAB III

MUKIM DI KECAMATAN MEUREUBO

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Meureubo.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Meureubo; dan
 - b. Mukim Ranto Panyang

Pasal 7

- (1) Wilayah Mukim Meureubo sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Meureubo;
 - b. Gampong Langung;
 - c. Gampong Gunong Kleng;
 - d. Gampong...

- d. Gampong Ujong Drien;
 - e. Gampong Peunaga Rayeuk;
 - f. Gampong Pasi;
 - g. Gampong Peunaga Cut Ujong;
 - h. Gampong Reudeup;
 - i. Gampong Balee;
 - j. Gampong Paya Peunaga;
 - k. Gampong Ujong Tanjong;
 - l. Gampong Pucok Reudeup;
 - m. Gampong Sumber Batu; dan
 - n. Gampong Bukit Jaya.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Meureubo mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pusat Pemerintahan Mukim Meureubo berada pada Gampong Meureubo.

Pasal 8

- (1) Wilayah Mukim Ranto Panyang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Ranto Panyang Barat;
 - b. Gampong Ranto Panyang Timur;
 - c. Gampong Mesjid Tuha;
 - d. Gampong Ujong Tanoh Darat;
 - e. Gampong Pasi Aceh Tunong;
 - f. Gampong Pasi Aceh Baroh;
 - g. Gampong Buloh;
 - h. Gampong Pulo Teungoh;
 - i. Gampong Paya Baro;
 - j. Gampong Ranup Dong;
 - k. Gampong Pasi Pinang; dan
 - l. Gampong Pasi Mesjid.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Ranto Panyang mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Ranto Panyang berada pada Gampong Ranto Panyang.

BAB IV

MUKIM DI KECAMATAN SAMATIGA

Pasal 9

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Samatiga.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Pasie;
 - b. Mukim Mesjid Tuha;
 - c. Mukim Meunumbok;

d. Mukim...

- d. Mukim Krueng Tinggai;
- e. Mukim Mesjid Baro; dan
- f. Mukim Lhok Bubon.

Pasal 10

- (1) Wilayah Mukim Pasie sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Alue Raya;
 - b. Gampong Cot Seulamat;
 - c. Gampong Teungoh;
 - d. Gampong Kula Bubon; dan
 - e. Gampong Pucok Lueng.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Pasie mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Pasie berada pada Gampong Alue Raya.

Pasal 11

- (1) Wilayah Mukim Mesjid Tuha sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Cot Mesjid;
 - b. Gampong Cot Darat;
 - c. Gampong Cot Pluh;
 - d. Gampong Cot Seumeureung;
 - e. Gampong Paya Lumpat; dan
 - f. Gampong Suak Timah.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Mesjid Tuha mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Mesjid Tuha berada pada Gampong Cot Mesjid.

Pasal 12

- (1) Wilayah Mukim Meunumbok sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Ujong Nga;
 - b. Gampong Cot Lampise;
 - c. Gampong Ladang;
 - d. Gampong Pinem;
 - e. Gampong Rangkileh; dan
 - f. Gampong Reusak.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Meunumbok mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Meunumbok berada pada Gampong Ujong Nga.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Wilayah Mukim Krueng Tinggi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Gampong Krueng Tinggi;
 - b. Gampong Keureuseng;
 - c. Gampong Leubok; dan
 - d. Gampong Pange
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Kreung Tinggi mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Kreung Tinggi berada pada Gampong Krueng Tinggi.

Pasal 14

- (1) Wilayah Mukim Mesjid Baro sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Gampong Mesjid Baro;
 - b. Gampong Cot Amun;
 - c. Gampong Deuah; dan
 - d. Gampong Leukeun.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Mesjid Baro mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Mesjid Baro berada pada Gampong Mesjid Baro.

Pasal 15

- (1) Wilayah Mukim Lhok Bubon sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Gampong Lhok Bubon;
 - b. Gampong Cot;
 - c. Gampong Suak Pandan; dan
 - d. Gampong Suak Seuke;
 - e. Gampong Suak Pante Breuh;
 - f. Gampong Suak Geudeubang; dan
 - g. Gampong Suak Seumaseh.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Lhok Bubon mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Lhok Bubon berada pada Gampong Lhok Bubon.

BAB V
MUKIM DI KECAMATAN BUBON

Pasal 16

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Bubon.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Gunong Panah;
 - b. Mukim Kuta Padang; dan
 - c. Mukim Suak Pangkat;

Pasal 17

- (1) Wilayah Mukim Gunong Panah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Gunong Panah;
 - b. Gampong Alue Lhok;
 - c. Gampong Alue Bakong;
 - d. Gampong Kuala Pling; dan
 - e. Gampong Seumuleng.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Gunong Panah mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Gunong Panah berada pada Gampong Gunong Panah.

Pasal 18

- (1) Wilayah Mukim Kuta Padang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Kuta Padang;
 - b. Gampong Beurawang;
 - c. Gampong Layung; dan
 - d. Gampong Rambong
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Kuta Padang mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Kuta Padang berada pada Gampong Kuta Padang.

Pasal 19

- (1) Wilayah Mukim Suak Pangkat sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Suak Pangkat;
 - b. Gampong Blang Sibeutong;
 - c. Gampong Cot Keumuneng;
 - d. Gampong Cot Lada;

e. Gampong...

- e. Gampong Liceh;
 - f. Gampong Peulanteu LB;
 - g. Seuneubok Trap; dan
 - h. Ulee Blang.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Suak Pangkat mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Suak Pangkat berada pada Gampong Suak Pangkat.

BAB VI
MUKIM DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK

Pasal 20

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Arongan Lambalek.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Mukim Arongan Deli; dan
 - b. Mukim Lambalek.

Pasal 21

- (1) Wilayah Mukim Gunong Panah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Gampong Drien Rampak;
 - b. Gampong Arongan;
 - c. Gampong Cot Buloh;
 - d. Gampong Cot Kumbang;
 - e. Gampong Kubu;
 - f. Gampong Keub;
 - g. Gampong Pante Meutia;
 - h. Gampong Peuribu;
 - i. Gampong Suak Keumude;
 - j. Gampong Seuneubok Lhong;
 - k. Gampong Suak Ie Beuso;
 - l. Gampong Suak Bidok;
 - m. Gampong Teupin Peuraho; dan
 - n. Gampong Ujong Beusa.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Arongan Deli mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Arongan Deli berada pada Gampong Drien Rampak.

Pasal 22

- (1) Wilayah Mukim Lambalek sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Gampong Seuneubok Teungoh;
 - b. Gampong Alue Bagok;

c. Gampong...

- c. Gampong Alue Sundak;
 - d. Gampong Alue Batee;
 - e. Gampong Cot Juru Mudi;
 - f. Gampong Panton Makmue;
 - g. Gampong Panton Bahagia;
 - h. Gampong Peulanteu LB;
 - i. Gampong Rimba Langgeh;
 - j. Gampong Simpang Peut;
 - k. Gampong Ujong Simpang;
 - l. Gampong Gunong Pulo; dan
 - m. Gampong Karang Hampa.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Lambalek mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (3) Pusat Pemerintahan Mukim Lambalek berada pada Gampong Seuneubok Teungoh.

BAB VII MUKIM DI KECAMATAN PANTE CEUREUMEN

Pasal 23

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Pante Ceureumen.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Kinco;
 - b. Mukim Lango;
 - c. Mukim Manjeng; dan
 - d. Mukim Gunong Meuh.

Pasal 24

- (1) Wilayah Mukim Kinco sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Meunuang Kinco;
 - b. Gampong Seumara;
 - c. Gampong Babah Lueng;
 - d. Gampong Babah Iseung;
 - e. Gampong Seumantok; dan
 - f. Gampong Alue Keumang.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Kinco mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Kinco berada pada Gampong Meunuang Kinco.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Wilayah Mukim Lango sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Lango;
 - b. Gampong Sikundo;
 - c. Gampong Lawet; dan
 - d. Gampong Canggih.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Lango mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Lango berada pada Gampong Lango.

Pasal 26

- (1) Wilayah Mukim Manjeng sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Pante Ceureumen;
 - b. Gampong Manjeng;
 - c. Gampong Keutambang;
 - d. Gampong Pulo Teunggoh; dan
 - e. Gampong Jambak.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Manjeng mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Manjeng berada pada Gampong Pante Ceureumen.

Pasal 27

- (1) Wilayah Mukim Gunong Meuh sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Gampong Suak Awe;
 - b. Gampong Tegal Sari;
 - c. Gampong Gunong Tarok;
 - d. Gampong Krueng Beukah;
 - e. Gampong Lhok Sari;
 - f. Gampong Babah Krueng Tep lep;
 - g. Gampong Berdikari;
 - h. Gampong lhok Guci;
 - i. Gampong Keude Suak Awe; dan
 - j. Gampong Sawang Rambot.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Gunong Meuh mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Gunong Meuh berada pada Gampong Suak Awe.

BAB VIII
MUKIM DI KECAMATAN SUNGAI MAS

Pasal 28

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Sungai Mas.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Tungkop; dan
 - b. Mukim Darul Ikhsan.

Pasal 29

- (1) Wilayah Mukim Tungkop sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Tutut;
 - b. Gampong Tungkop;
 - c. Gampong Sakuy;
 - d. Gampong Kajeung;
 - e. Gampong Geudong;
 - f. Gampong Sarah Perlak;
 - g. Gampong Drien Sibak;
 - h. Gampong Tuwi Saya; dan
 - i. Gampong Lancong.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Tungkop mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Tungkop berada pada Gampong Tutut.

Pasal 30

- (1) Wilayah Mukim Darul Ikhsan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Gaseu;
 - b. Gampong Sipot;
 - c. Gampong Pungkie;
 - d. Gampong Gunong Buloh;
 - e. Gampong Ramitie;
 - f. Gampong Leubok Beutong;
 - g. Gampong Gleng;
 - h. Gampong Tanoh Mirah; dan
 - i. Gampong Lueng Baro.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Darul Ikhsan mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Darul Ikhsan berada pada Gampong Gaseu.

BAB IX
MUKIM DI KECAMATAN PANTON REU

Pasal 31

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Panton Reu.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Mugo;
 - b. Mukim Meuko; dan
 - c. Krueng Manggie.

Pasal 33

- (1) Wilayah Mukim Mugo sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Mugo Rayeuk;
 - b. Gampong Meutulang;
 - c. Gampong Mugo Cut;
 - d. Gampong Baro Paya;
 - e. Gampong Sibintang; dan
 - f. Gampong Blang Teungoh.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Mugo mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Mugo berada pada Gampong Mugo Rayeuk.

Pasal 33

- (1) Wilayah Mukim Meuko sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Ujong Raja;
 - b. Gampong Antong;
 - c. Gampong Tuwi Buya;
 - d. Gampong Paya Baro Meuko; dan
 - e. Gampong Kuala Manyeu;
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Meuko mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Meuko berada pada Gampong Ujong Raja.

Pasal 34

- (1) Wilayah Mukim Krueng Manggie sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Baro;
 - b. Gampong Tamping;
 - c. Gampong Manggie;
 - d. Gampong Lek-lek;

e. Gampong...

- e. Gampong Blang Balee;
 - f. Gampong Cot Manggi;
 - g. Gampong Babah Krueng Manggi; dan
 - h. Gampong Gunong Mata Ie.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Krueng Manggi mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Babah Krueng Manggi berada pada Gampong Baro.

BAB X
MUKIM DI KECAMATAN WOYLA

Pasal 35

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Woyla.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Mukim Kuala Bhee;
 - b. Mukim Keuleumbah; dan
 - c. Babah Cot Murong.

Pasal 36

- (1) Wilayah Mukim Kuala Bhee sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Gampong Kuala Bhee;
 - b. Gampong Pasi Lunak;
 - c. Gampong Pasi Aceh;
 - d. Gampong Aron Tunong;
 - e. Gampong Aron Baroh;
 - f. Gampong Pasi Pandan;
 - g. Gampong Ranto Panyang;
 - h. Gampong Geumpa Raya;
 - i. Gampong Padang Jawa;
 - j. Gampong Ie Itam Tunong;
 - k. Gampong Ie Itam Baroh;
 - l. Gampong Tingkeum Panyang;
 - m. Gampong Lueng Teungku Yah;
 - n. Gampong Lueng Tanoh Tho;
 - o. Gampong Gunong Rambong;
 - p. Gampong Drien Mangko;
 - q. Gampong Gunong Hampa;
 - r. Gampong Lueng Jawa;
 - s. Gampong Blang Mee;
 - t. Gampong Alue Blang;
 - u. Gampong Paya Dua;
 - v. Gampong Paya Luah;
 - w. Gampong Pasi Ara;
 - x. Gampong Alue Sikaya;
 - y. Gampong Darul Huda; dan
 - z. Gampong Lueng Buloh.

- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Kuala Bhee mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Kuala Bhee berada pada Gampong Kuala Bhee.

Pasal 37

- (1) Wilayah Mukim Keuleumbah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Keuleumbah;
 - b. Gampong Jawa;
 - c. Gampong Pulo Ie;
 - d. Gampong Alue Panyang;
 - e. Gampong Cot Keumude;
 - f. Gampong Seumantok;
 - g. Gampong Cot Situah;
 - h. Gampong Jawi;
 - i. Gampong Panton;
 - j. Gampong Pasi Birah;
 - k. Gampong Alue Sundak;
 - l. Gampong Teumarom; dan
 - m. Gampong Bakat.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Keuleumbah mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Keuleumbah berada pada Gampong Keuleumbah.

Pasal 38

- (1) Wilayah Mukim Cot Murong sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Cot Murong;
 - b. Gampong Gle Siblah;
 - c. Gampong Suak Trieng; dan
 - d. Gampong Cot Lagan BB.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Cot Murong mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Cot Murong berada pada Gampong Cot Murong.

BAB XI

MUKIM DI KECAMATAN WOYLA TIMUR

Pasal 39

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Woyla Timur.

(2 Mukim...

- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Woyla Tunong; dan
 - b. Mukim Krueng Bhee.

Pasal 40

- (1) Wilayah Mukim Woyla Tunong sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Pasi Janeng;
 - b. Gampong Seuradeuk;
 - c. Gampong Leubok Panyang;
 - d. Gampong Paya Baro;
 - e. Gampong Kubu Capang;
 - f. Gampong Pasi Ara WT;
 - g. Gampong Baro WT;
 - h. Gampong Rambong;
 - i. Gampong Cot Punt; dan
 - j. Gampong Alue Eumpeuk;
 - k. Gampong Alue Bilie;
 - l. Gampong Tangkeh; dan
 - m. Gampong Paya Meugeundrang.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Woyla Tunong mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Woyla Tunong berada pada Gampong Pasi Janeng.

Pasal 41

- (1) Wilayah Mukim Krueng Bhee sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Alue Meuganda;
 - b. Gampong Alue Kuyun;
 - c. Gampong Buket Meugajah;
 - d. Gampong Blang Dalam;
 - e. Gampong Teumikot Ranom;
 - f. Gampong Blang Makmu;
 - g. Gampong Baro KB;
 - h. Gampong Alue Seuralen;
 - i. Gampong Rambong Pinto;
 - j. Gampong Tuwi Eumpeuk;
 - k. Gampong Blang Luah KB;
 - l. Gampong Seuneubok Dalam; dan
 - m. Gampong Gunong Panyang.
- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Krueng Bhee mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Krueng Bhee berada pada Gampong Alue Meuganda.

BAB XII
MUKIM DI KECAMATAN WOYLA BARAT

Pasal 42

- (1) Dengan Qanun ini diakui keberadaan Mukim yang telah ada di Kecamatan Woyla Barat.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Lhok Malee; dan
 - b. Mukim Karak.

Pasal 43

- (1) Wilayah Mukim Lhok Malee sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Lhok Malee;
 - b. Gampong Blang Luah;
 - c. Gampong Cot Rambong;
 - d. Gampong Pasi Malee;
 - e. Gampong Napai;
 - f. Gampong Blang Cot Mameh;
 - g. Gampong Blang Cot Rubek;
 - h. Gampong Alue Leuhob;
 - i. Gampong Leubok Pasi Ara;
 - j. Gampong Ulee Pasi Ara;
 - k. Gampong Cot Lagan LM;
 - l. Gampong Lueng Baro;
 - m. Gampong Kulam Kaju;
 - n. Alue Perman; dan
 - o. Peuleukung.
- (2) Luas wilayah dan Batas Mukim Lhok Malee mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim Lhok Malee berada pada Gampong Lhok Malee.

Pasal 44

- (1) Wilayah Mukim Karak sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Karak;
 - b. Gampong Pasi Jeut;
 - c. Gampong Mon Pasong;
 - d. Gampong Pasi Mali;
 - e. Gampong Ie Sayang;
 - f. Gampong Ulee Pulo;
 - g. Gampong Pasi Panyang;
 - h. Gampong Alue Keumuning; dan
 - i. Gampong Simpang Teumarom;
 - j. Gampong Alue Eumpeuk;
 - k. Gampong Alue Bilie;
 - l. Gampong Tangkeh; dan
 - m. Gampong Paya Meugeundrang.

(2) Luas...

- (2) Luas Wilayah dan Batas Mukim Karak mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Mukim karak berada pada Gampong Karak.

BAB XIII

PEMBENTUKAN MUKIM DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

Pasal 45

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan.
- (2) Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mukim Ujong Kalak;
 - b. Mukim Balee Puteh;
 - c. Mukim Tgk. Chik Dirundeng; dan
 - d. Mukim Putroe Ijo.

Pasal 46

- (1) Wilayah Mukim Ujong Kalak sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Gampong Ujong Kalak;
 - b. Gampong Kampung Belakang;
 - c. Gampong Pasir;
 - d. Gampong Suak Indra Puri;
 - e. Gampong Pasar Aceh;
 - f. Gampong Panggong; dan
 - g. Gampong Padang Seurahet.
- (2) Luas wilayah dan batas Mukim Ujong Kalak mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat pemerintahan Mukim Ujong Kalak berada pada Gampong Ujong Kalak.

Pasal 47

- (1) Wilayah Mukim Balee Puteh sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Gampong Kuta Padang;
 - b. Gampong Suak Ribee;
 - c. Gampong Suak Sigadeng;
 - d. Gampong Suak Raya; dan
 - e. Gampong Suak Nie.
- (2) Luas wilayah dan batas Mukim Balee Puteh mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pusat...

- (3) Pusat pemerintahan Mukim Balee Puteh berada pada Gampong Kuta Padang.

Pasal 48

- (1) Wilayah Mukim Tgk. Chik Dirundeng sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gampong Rundeng;
 - b. Gampong Ujong Baroh;
 - c. Gampong Drien Rampak;
 - d. Gampong Seuneubok; dan
 - e. Gampong Darat.
- (2) Luas wilayah dan batas Mukim Tgk Chik Dirundeng mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat pemerintahan Mukim Tgk. Chik Dirundeng berada pada Gampong Rundeng.

Pasal 49

- (1) Wilayah Mukim Putroe Ijo sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Gampong Leuhan;
 - b. Gampong Blang Beurandang;
 - c. Gampong Lapang; dan
 - d. Gampong Gampa.
- (2) Luas wilayah dan batas Mukim Putroe Ijo mengacu pada luas dan batas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat pemerintahan Mukim Putroe Ijo berada pada Gampong Leuhan.

BAB XIV

KEWENANGAN MUKIM

Pasal 50

Mukim sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.

BAB XV

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 51

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Imum Mukim dan Tuha Peut Mukim beserta kelengkapannya pada Mukim sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini tetap diakui keberadaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk...

- (3) Untuk melaksanakan Pemerintahan Mukim pada Mukim sebagaimana dimaksud ditunjuk Penjabat Imum Mukim dengan Keputusan Bupati sebelum adanya Imum Mukim terpilih/definitif.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Imum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Penjabat Imum Mukim bertugas menjalankan tugas pemerintahan Mukim, membentuk struktur organisasi di bawah Imum Mukim dan memfasilitasi terbentuknya Tuha Peut Mukim dan memfasilitasi pemilihan Imum Mukim Definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan atas terbentuknya Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

I. UMUM

Mukim di Kabupaten Aceh Barat telah berperan baik di bidang pemerintahan maupun adat dan adat istiadat. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim tidak hanya sebagai lembaga adat melainkan pula sebagai lembaga pemerintahan. Dewasa ini di Kabupaten Aceh Barat terdapat 32 Mukim yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Johan Pahlawan belum dibentuk Mukim, sehingga beberapa tugas pemerintahan, adat dan adat istiadat di Kecamatan Johan Pahlawan belum dapat terlaksana. Oleh karena itu, selain diperlukan memberikan dasar hukum terhadap mukim yang telah ada, juga dianggap penting untuk membentuk mukim di Kecamatan Johan Pahlawan. Pembentukan Mukim di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.